BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Gambaran dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat cenderung meningkat setiap tahunnya. Penerima dana perimbangan terendah di wilayah I adalah Kabupaten Bogor dengan rata-rata penerimaan sebesar Rp. 2,160,533, dan penerima terkecil adalah Kota Sukabumi sebesar Rp. 500,626. Di wilayah II rata-rata penerimaan terbesar adalah Karawang dengan Rp. 1,431,216 dan Purwakarta sebagai daerah penerimaan terendah yaitu sebesar Rp. 812,804. Sementara di Wilayah III penerima terbesar adalah Kabupaten Cirebon dengan Rp. 1,375,191 dan Kota Cirebon yang terendah dengan Rp. 626,417. Dan untuk wilayah IV Kabupaten Bandung menerima dana terbesar sebanyak Rp. 1,958,044 dan terendah adalah Kota Banjar dengan rata-rata Rp. 372,701.
- 2. Gambaran kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat belum dapat dikatakan mandiri secara keseluruhan, karena hanya 3 daerah yang sudah tergolong pada kemampuan keuangan sedang dengan pola hubungan *partisipatif*, Sementara 6 daerah masih tergolong pada kemampuan keuangan rendah dengan pola hubungan *konsultatif* dan sisanya sebanyak 17 daerah masih tergolong pada kemampuan keuangan rendah sekali dengan pola hubungan instruktif. Kemapuan keuangan daerah yang masih tergolong rendah sekali dengan pola hubungan *instruktif* ini menandakan bahwa daerah di Jawa Barat masih menggantungkan dirinya pada bantuan dari pemerintah pusat, yang mana pendapatan asli daerah belum menjadi sumber keuangan terbesar dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.

3. Gambaran kesejahteraan masyarakat yang diproksikan menggunakan indeks pembangunan manusia (IPM) menunjukkan pada tahun 2014 terdpat 7 Kota dan 1 Kabupaten di Provinsi Jawa Barat sudah dapat mencapai IPM dengan

kategori tinggi yaitu >70. Namun secara rata-rata IPM Kabupaten dan Kota di Jawa Barat masih tergolong pada kategori IPM sedang, yaitu berkisar antara 60-70. Capaian IPM tertinggi adalah Kota Bandung dengan 78,98 dan Kabupaten Cianjur dengan 62,08 yang cukup tertinggal dibandingkan dengan daerah lainnya.

- 4. Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat pada Kabupaten dan Kota di Jawa Barat pada tahun 2011 hingga tahun 2014
- Kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat pada Kabupaten dan Kota di Jawa Barat pada tahun 2011 hingga tahun 2014

B. Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterprestasikan hasil penelitian. Beberapa keterbatasan tersebut antara lain adalah :

- Variabel dana perimbangan yang digunakan peneliti tidak memisahkan bagian untuk pelayanan publik. Sehingga peneliti tidak mengetahui berapa besar dana yang berperan dalam peningkatan IPM dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 2. Keterbatasan variabel yang digunakan dalam penelitian ini.
- 3. Kurun waktu penelitian yang hanya dapat dilakukan hingga tahun 2014 karena ketidak tersediaan data penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, saran yang dapat dikemukakan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten dan Kota sebaiknya dapat meningkatkan lagi capaian indeks pembangunan manusia, mengingat bahwa baru beberapa Kota besar saja yang dapat mencapai IPM tinggi. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memperhatikan pelayanan pemerintah pada masyarakat, baik pelayanan dibidang pengetahuan seperti perbaikan sarana dan prasara sekolah, ataupun mengembangkan program-program yang memudahkan masyarakat mendapatkan pendidikan. Pelayanan kesehatan baik bantuan tenaga medis, Tia Amelia. 2016

obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau atupun mempermudah akses ke rumah sakit. Serta dalam upaya meningkatkan standar hidup layak masyarakat dengan menyediakan lapangan pekerjaan agar terserapnya tenaga kerja.

- 2. Pemerintah Kabupaten dan Kota sebaiknya tidak bergantung pada dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat seperti dana perimbangan, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari masing-masing daerah.
- 3. Pemerintah Kabupaten dan Kota sebaiknya dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah dengan cara menggali potensi-potensi daerah, seperti mengoptimalkan pembayaran pajak daerah dan retribusi yang menjadi sumber pendapatan asli daerah. Sehingga PAD dapat menyumbangkan kontribusi yang besar pada pemerintah daerah yang akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah.
- 4. Untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa yaitu pengaruh dana perimbangan dan kemandirian keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat menambah populasi dan sampel yang lebih luas. Selain itu dapat juga menambahkan faktor-faktor lain yang dianggap berpengaruh pada keesejahteraan masyrarakat seperti pertumbuhan ekonomi, keseraisan alokasi belanja serta faktor lainnya yang dianggap dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.